

JUMAT, 27 MARET 2026

TAJUK RENCANA

Blunder Pengalihan Tahanan Rumah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat sorotan setelah memberlakukan tahanan rumah sejak Kamis (19/3) kepada mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Langkah KPK ini dianggap aneh dan memicu kontroversi. Meskipun tersangka sudah kembali ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK sejak Selasa (24/3), banyak pihak mempertanyakan langkah yang seolah-olah memberikan perlakuan khusus kepada Yaqut.

Aktivis Antikorupsi Emerson Yuntho menyebut, sepanjang sejarah berdirinya KPK, Yaqut Cholil Qoumas tercatat sebagai tersangka korupsi pertama yang status penahanannya dialihkan menjadi tahanan rumah. Menurut eks Penyidik Senior KPK Novel Baswedan, mestinya Dewas memeriksa pejabat lembaga anti-rasuah yang mengalihkan status penahanan tersebut. Sementara Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai langkah KPK merusak sistem dan menimbulkan diskriminasi.

KPK sempat mengungkapkan pengalihan status penahanan ini atas permohonan keluarga. Langkah itu juga dianggap sebagai strategi penanganan perkara agar berjalan lancar. Alasan ini agak susah diterima oleh publik. Sebab selama ini, aparat penegak hukum justru beralasan sebaliknya ketika menangani perkara. Untuk memudahkan penyidikan dan penanganan perkara, justru penahanan terhadap tersangka dilakukan di rutan. Kemudian diperpanjang jika masa penahanan habis.

Langkah KPK menjadi blunder bagi lembaga tersebut. Apalagi terkuak alasan yang berbeda saat pengalihan status tahanan. Sebelumnya Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Yaqut menjadi tahanan rumah bukan karena sakit, melainkan permohonan dari keluarga. Pengalihan status itu disebutnya sebagai kewenangan penyidik. Namun Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan masalah kesehatan menjadi salah satu alasan pengalihan status penahanan.

Ketidaksinkronan pernyataan tersebut menunjukkan ada hal yang belum transparan diungkap KPK pada publik. Karena itu, semestinya lembaga tersebut tetap memegang teguh kepercayaan yang selama ini sudah ditambatkan publik pada KPK. Jika memang alasan kesehatan, bisa saja langsung dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Langkah tersebut sangat manusiawi karena menghormati hak tersangka untuk mendapatkan perawatan. Selain itu juga menjaga muruah KPK.

Kini sorotan tajam sudah telanjur diarahkan pada lembaga antikorupsi tersebut. Menjadi tugas berat KPK menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji. Jangan sampai hasil dari pengungkapan kasus tersebut nanti akan dikaitkan dengan pengalihan status penahanan. Publik masih berharap KPK akan bekerja secara transparan. Jika diperlukan, Dewas juga bisa saja melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di KPK agar publik lebih yakin lembaga tersebut profesional dalam bekerja.